

RINGKASAN

Pada akhir tahun 2021, masyarakat kota Bandung dihebohkan dengan kejadian tertangkapnya seorang guru pesantren bernama Herry Hirawan yang memperkosa 13 (tiga belas) orang santri putrinya hingga hamil. Hal menarik dari perkara terdakwa Herry Hirawan yaitu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung menuntut terdakwa Herry Hirawan berupa membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani. Terkait tuntutan pembubaran yayasan tentunya menimbulkan perdebatan karena hal ini merupakan ranah keperdataan akan tetapi dalam perkara ini dimohonkan dalam tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar dan tujuan yang dicapai dalam penggabungan tuntutan pembubaran yayasan dalam perkara tindak pidana perlindungan anak atas nama terdakwa Herry Hirawan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung serta untuk mengetahui pertimbangan penggabungan tuntutan pembubaran yayasan dalam perkara tindak pidana perlindungan anak atas nama terdakwa Herry Hirawan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Diperoleh hasil penelitian bahwa dasar dan tujuan penggabungan tuntutan pembubaran yayasan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perlindungan anak atas nama terdakwa Herry Hirawan dengan pendekatan hukum progresif yaitu melakukan terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam rangka penyelesaian perkara secara efektif dan efisien demi tercapainya asas peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, hal tersebut dikarenakan jika tuntutan pidana tersebut terkabul, maka Kejaksaan dalam kapasitasnya mewakili kepentingan umum tidak perlu lagi mengajukan gugatan pembubaran yayasan secara keperdataan.

Kata Kunci : Penggabungan Tuntutan, Pembubaran Yayasan, Hukum Progresif, Tindak Pidana Perlindungan Anak, Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

SUMMARY

At the end of 2021, the people of Bandung were shocked by the arrest of a boarding school teacher named Herry Hirawan who raped 13 (thirteen) of his daughters until she became pregnant. The interesting thing about the defendant Herry Hirawan's case is that the Public Prosecutor at the Bandung City Public Prosecutor's Office demanded that the defendant Herry Hirawan freeze, revoke and dissolve the Manarul Huda Orphanage Foundation, Madani Boarding School, and Tahfidz Madani Islamic Boarding School. Related to the demand for the dissolution of the foundation, of course, raises debate because this is a civil matter, but in this case it was filed in a lawsuit by the Public Prosecutor at the Bandung City Public Prosecutor's Office. The purpose of this study is to find out the basis and objectives achieved in the merger of demands for dissolution of the foundation in the case of child protection crimes on behalf of the defendant Herry Hirawan at the Bandung City District Attorney and to find out the considerations for merging the demands for the dissolution of the foundation in the criminal case of child protection on behalf of the defendant Herry Hirawan at the Bandung District Attorney. The research method used in this thesis is an empirical juridical approach with qualitative analysis. The research results obtained that the basis and purpose of combining demands for the dissolution of the foundation by the Public Prosecutor in the case of the crime of child protection on behalf of the defendant Herry Hirawan with approach progressive legal, namely making new breakthroughs carried out by the Public Prosecutor in the context of resolving cases effectively and efficiently for the sake of achieving the principle of justice quickly, simply and at low cost, this is because if the criminal charge is granted, then the Attorney General's Office in its capacity to represent the public interest no longer needs to file a lawsuit for civil dissolution of the foundation.

Keywords: Combination of Claims, Dissolution of Foundations, Progressive Legal, Child Protection Crimes, Quick, Simple, and Low Cost Trial Principles.